UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kewenangan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mengantisipasi Debitor
Menghapuskan Utang Melalui Proses Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST.,
Tanggal 26 Februari 2024)**
Martin Johannes Ronitua, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ilyas, Amir, dan Muh. Nursal N.S., *Kumpulan Asas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.

Jono. *Hukum Kepailitan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Lontoh, Rudhy A dkk. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Simanjuntak, Ricardo. *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik*. Jakarta : Kontan Publishing, 2023.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Suyatno, R. Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 2013.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kewenangan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mengantisipasi Debitor
Menghapuskan Utang Melalui Proses Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST.,
Tanggal 26 Februari 2024)**
Martin Johannes Ronitua, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wijaya, Andika. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Wijayanta, Tata dkk. *Cross-Border Insolvency Kerja Sama Lintas Batas Antar lembaga Peradilan : Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Wijayanta, Tata, dan Sheva Trisanda Adistia. *Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

Wijayanta, Tata dkk. *Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian : Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Pembagian Harta Pailit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.

Wijayanta, Tata. *Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan : Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Hukum Acara Perdata-Perdata Kepailitan Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024.

Hasil Penelitian/Disertasi

Dewi, Iryani. "PKPU Dalam Penyelesaian Utang Piutang Yang Berkeadilan", *Disertasi*, Tidak dipublikasikan, Program Doktor Universitas Brawijaya, 2018.

Nadirah, Ida. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan", *Disertasi,* Tidak dipublikasikan, Program Doktor Universitas Sumatera Utara, 2018.

Jurnal

Aditya, Tjokorda Agung Candra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).", *Dharmasisya* 1, no. 3 (September 2021): 1549-1558.

Dirgantara, Febrian., Putra, Arif Rachman., dan Darmawan, Didik. "Peran Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang di Indonesia." *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Agustus 2025): 149-160.

Firdaus, Dadang. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 10, no. 2 (Agustus 2016): 67-89.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kewenangan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mengantisipasi Debitor
Menghapuskan Utang Melalui Proses Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST.,
Tanggal 26 Februari 2024)**
Martin Johannes Ronitua, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Harsono, Ivan., dan Prananingtyas, Paramita. "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer.", *Notarius* 12, no. 2 (2019): 1067-1088.

Rifani, Ratu Alawiyyah., Fauziah., dan Fahruddin, Muhammad. "Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)", *Jurnal Jurisdictie* 3, no. 2 (Desember 2021): 146-161.

Silalahi, Udin., dan Tanjung, Beatrix. "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi.", *Undang : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 371-401.

Wijayanta, Tata. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru.", *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (Juni 2010): 330-346.

Wijayanta, Tata. "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi.", *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (Oktober 2010): 482-497.

Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.", *Mimbar Hukum* 26, no. 1 (Februari 2014): 1-10.

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.", *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (Mei 2014): 216-226.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kewenangan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mengantisipasi Debitor
Menghapuskan Utang Melalui Proses Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST.,
Tanggal 26 Februari 2024)**
Martin Johannes Ronitua, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., perihal putusan PKPU terhadap PT APP, 20 Juni 2023.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., perihal pengesahan perdamaian antara PT APP dengan Para Kreditor, 26 Februari 2024.

Wawancara

Augusta, Yosia, 2025, Kewenangan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mengantisipasi Debitor Menghapuskan Utang Melalui Proses Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.), Tanggal 26 Februari 2024), *Wawancara*, Jakarta, 26 Juni.

Pramiyadi, Denny, 2025, Kewenangan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mengantisipasi Debitor Menghapuskan Utang Melalui Proses Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.), *Wawancara*, Jakarta, 4 Juli.